KLIPING
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:
☐ Bangka Pos ☑ Babel Pos
☐ Babel News ☐ Radar Bangka
☐ Rakyat Pos ☐ Lainnya: _____

Tanggal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ✓

Bulan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ✓

Thn: 2 0 1 7

Halaman: 1 ✓ 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 23 24

Bateng Raih Predikat WTP ke 4 Kali

Erzaldi: Kita *Nggak* Beli

- Ibnu: Kerja Super Tim
- Arif: Ada yang Bermain

LAPORAN keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) tahun 2016 memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung (Babel). Penyerahan LHP kemarin sore berlangsung di kantor BPK perwakilan Babel yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Arif Agus Kepada ketua DPRD Bateng Algafry Rahman dan Plt Bupati Bateng, Ibnu Saleh dengan disaksikan mantan Bupati Bateng yang juga Gubernur Babel, Erzaldi Roesman.

■ Ke halaman 6

Erzaldi Roesman

Arif Agus

Ibnu Saleh

KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: ☐ Bangka Pos ☑ Babel Pos ☐ Babel News ☐ Radar Bangka ☐ Rakyat Pos ☐ Lainnya: _____

Tanggal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ✓

Bulan: 1 2 3 4 5 ✓ 6 7 8 9 10 11 12

Thn: 2 0 1 7

Halaman: 1 ✓ 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24

Erzaldi: Kita

(dari halaman 1)

PEROLEHAN Predikat WTP ditengah hebohnya OTT oknum BPK oleh KPK dalam kasus 'predikat' ini, membuat nuansa terasa beda dari biasanya.

Kepada wartawan, Gubernur Babel, Erzaldi mengklaim peroleh WTP tersebut murni tanpa 'membeli' kepada BPK. Baginya, kejadian memalukan berupa OTT oleh KPK beberapa waktu lalu kepada pejabat BPK pusat akibat menerima suap dan hadiah dari pejabat Kementerian Desa Tertinggal, menurut Erzaldi tidak akan dilakukan oleh aparatnya selama dirinya menjabat Bupati Bateng.

"Ngapain kita beli-beli dan mau gitu. Kita mau benar kok. Justeru saya bersyukur walau dikasih WDP. Karena kenapa, itu menjadi acuan kita agar tidak mengerjakan pekerjaan keliru dan salah," ujar Erzaldi dengan nada keras.

Bagi Erzaldi, perolehan WTP bukan berarti pengelolaan keuangan pemerintahan itu tidak ada korupsi. Dia katakan tetap ada, dan sudah terbukti bahkan dialami sendiri oleh anak buahnya saat di Bateng. Dimana dikatakanya ada 3 kasus korupsi dan sudah mendekam di penjara semuanya. "Dengan adanya WTP ini bukan berarti kita juga sudah benar. Temuan (korupsi) itu tetap ada. Di Bateng zaman saya ada 3 kasus korupsi dan sudah dipenjara semua," ungkapnya.

Dia juga mengarahkan kepada jajaranya terutama di Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Bilamana ada temuan BPK dan ada perintah untuk pengembalian agar ditaati. "Bila ada perintah pengembalian harus ditaati. Dan bila tidak kita perbaiki selama 60 hari, bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum," ujarnya.

Atas perolehan WTP juga baginya harus disyukuri. Hal ini bisa menjadi alat pengukur kinerja para birokrat dan ASN. "Dan semoga WTP di Bangka tengah ini bisa diikuti oleh kabupaten, kota termasuk provinsi. Tetapi bukan berarti bebas korupsi dan ini harus dipahami," tandasnya lagi.

Ibnu: Kerja Super Tim

Prestasi membanggakan yang diraih Bumi Selawang Segantang itu, menurut Plt Bupati Bateng, Ibnu Saleh adalah berkat kerja tim. "Alhamdulillah kita dapat kembali opini WTP dari BPK RI. Ini tentunya berkat kerja tim dan juga berkat bimbingan Pak Gubernur (Erzaldi Rosman-red) yang sebelumnya masih menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah," ujar Plt. Bupati Bangka Tengah, H. Ibnu Saleh saat dikonfirmasi Babel Pos, tadi malam seusai kegiatan buka puasa bersama kaum dhuafa di Rumdin di Koba.

Apa yang dikatakan Ibnu cukup beralasan mengingat bukanlah persoalan mudah untuk mencapai opini WTP dari BPK RI. Raihan prestasi inipun seakan mengulang nostalgia manis sebelumnya, dimana selama tiga tahun berturut-turut Pemda Kabupaten Bangka Tengah pernah meraih prestasi yang sama di tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun, di tahun 2014 dan 2015 prestasi gemilang ini gagal diulangi karena hanya memperoleh predikat Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan baru bisa terulang di laporan keuangan tahun 2016.

"Kerja tim ini akan lebih kita tingkatkan lagi. Opini WTP ini juga kita raih berkat peran serta seluruh elemen masyarakat. Peran serta wartawan juga ada, misalnya dengan adanya dukungan pemberitaan yang positif. Termasuk juga masyarakat, dimana masyarakat yang mendapat dana hibah bisa membuat pelaporan yang baik. Jadi, opini WTP ini memang berkat sumbangsih semua pihak," ungkapnya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja tim ini yang bekerja tidak mengenal waktu. Yang lebih membanggakan baru daerah kita yang pertama mendapat WTP di tahun ini. Karena untuk daerah lain masih dalam proses," sambungnya.

Saat disinggung apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan opini WTP ini mengingatnya sebelumnya selama dua tahun berturut-turut pernah gagal meraih predikat tersebut, Ibnu menegaskan kedepannya yang akan dilakukan pihaknya antara lainnya menjaga soliditas tim dan saling mengingatkan agar bekerja sesuai SOP. "Sebenarnya konsepnya sederhana saja, jadikan pemeriksaan itu sebagai suatu hal kebiasaan dan tidak perlu ditakuti. Kalau sudah menjadi kebiasaan, pemeriksaan itu menjadi hal yang biasa dan kedepannya tidak lagi menjadi kesulitan bagi kita untuk meraih WTP kalau pemeriksaan itu sudah menjadi suatu kebutuhan," terangnya panjang lebar.

"Sekarang kita sudah mempunyai kemampuan. Jadi, sekarang jangan lengah dan jangan cepat puas. Selalu bersiap untuk mendapat hal yang terbaik," ingatnya menambahkan.

Ada yang Bermain

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Babel, Arif Agus menyatakan, praktik korupsi di tingkat birokrasi pemerintahan di seluruh Bangka Belitung masih subur walau sudah mendapat opini WTP. Tingkat suburnya korupsi tersebut nampak dari banyaknya penghitungan kerugian negara (PKN) yang masuk ke BPK atas pesanan lembaga penegak hukum seperti tipikor Kejaksaan.

"Ya kami sadar memang subur, walau sudah diberi opini wajar. Tetapi perolehan opini wajar itu bukan berarti itu bebas korupsi, kita banyak diminta oleh Kejaksaan sebagai ahli untuk menghitung kerugian negara atau PKN dari penyidikan mereka," kata kepala BPK perwakilan Bangka Belitung, Arif Agus kepada harian ini.

Terkait adanya perilaku serupa terlihat dari hasil OTT oleh KPK terhadap pejabat BPK pusat dalam jual beli opini itu di Bangka Belitung dirinya tak menampik. Namun bagi pria berkaca mata ini mengklaim itu ulah oknum anak buahnya saja saat di lapangan. "Itu oknumnya bukan BPK. Untuk memperoleh opini WDP ataupun WTP itu tidak mudah dan tidak bisa diputuskan seorang saja. Tetapi itu bersama-sama, ada pengawasan di sana," ucapnya.

Dari kejadian OTT yang menimpa lembaganya itu disadarinya sangat memalukan. Sehingga ini harus menjadi pembelajaran bagi anak buahnya di lapangan saat bekerja. Dia juga meminta anak buah menunjukan kinerja yang profesional, bermoral dan berintegritas. "Sistem kita sangat ketat. Tetapi memang sebaik apapun sebuah sistem itu akan kembali kepada manusianya juga. (Anak buah) agar lebih berhati-hati, tunjukan profesionalitasnya, ini jadi pelajaran," tandasnya. **(eza/obh)**